

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KONTRAK KERJA KLIEN PEMASYARAKATAN PADA PROGRAM KEMANDIRIAN BALAI PEMASYARAKATAN

Oleh

Dhonny Fatwa Ammarul Akbar

2322011058

Salah satu pembinaan yang dilakukan di balai pemasyarakatan adalah pembinaan kemandirian yang dalam hal ini merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Melalui adanya pembinaan kemandirian kepada klien pemasyarakatan, maka setiap klien pemasyarakatan berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pasal 29 Peraturan pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Berdasarkan pengertian diatas tentunya pihak klien pemasyarakatan terikat oleh perjanjian dengan balai pemasyarakatan untuk mengadakan kontrak kerja pada program kemandirian balai pemasyarakatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif – empiris berupa produk perilaku hukum dengan tujuan menganalisa legalitas kontrak kerja klien pemasyarakatan yang terikat dengan balai pemasyarakatan serta hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan akibat hukum daripada kontrak terkait.

Hasil penelitian analisis yuridis kontrak kerja klien pemasyarakatan pada program kemandirian balai pemasyarakatan adalah legalitas kontrak kerja klien pemasyarakatan sepatutnya diduga sah secara hukum, karena memenuhi unsur syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW. Klien pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terikat dengan kontrak kerja klien pemasyarakatan.

Kata kunci : Syarat Sah Perjanjian, Kontrak Kerja , Hak dan Kewajiban pihak

ABSTRACT

One of the coaching carried out in the correctional center is independence coaching, which in this case is an activity to produce goods and services that have benefits and added value. Through independence coaching for correctional clients, each correctional client has the right to receive wages or premiums for the work they have done. In addition, in Government Regulation no. 32 of 1999, article 29 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Residents states that every prisoner who works has the right to receive wages or premiums. Based on the understanding above, of course, the correctional client is bound by an agreement with the correctional center to enter into a work contract for the correctional center's independence program.

This type of research is normative legal research - empirical research that uses normative legal case studies - empirical in the form of legal behavioral products with the aim of analyzing the legality of the work contract of correctional clients bound by the correctional center and the rights and obligations of the parties in carrying out the legal consequences of the related contract.

The results of the research on the legal analysis of the work contract of correctional clients in the independence program of the correctional center are that the legality of the work contract of the correctional client should be assumed to be legally valid, because it meets the elements of the valid requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Correctional clients and correctional centers produce rights and obligations that must be fulfilled by each party bound by the work contract of the correctional client.

Keywords : Valid Terms of Agreement, Employment contract, Rights and obligations of parties